

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seni telah menjadi suatu hal yang berkesinambungan dalam kehidupan umat manusia. Seiring waktu berjalan, bentuk-bentuk seni terpecah menjadi beberapa bagian, salah satunya adalah musik. Musik sejak sekitar abad ke-4 telah membawa pengaruh yang signifikan dalam kehidupan umat manusia, baik yang bentuknya sederhana maupun yang rumit. Istilah (seni) musik berasal dari bahasa Yunani yakni *muse* yang artinya dewa.¹ Musik juga merupakan salah satu hasil dari kebudayaan manusia, dimana unsur-unsur kebudayaan bisa ditemui di mana saja, baik dalam masyarakat pedesaan yang terpencil maupun masyarakat perkotaan yang kompleks. Salah satunya di dalam kehidupan bernegara ataupun masalah politik dalam suatu negara.

Menurut Lockard, musik bisa dilihat sebagai “kaca” dan “lampu”. Sebuah kaca yang mampu menggambarkan kehidupan masyarakat dan lampu yang mampu menerangi situasi dan kondisi (atau bahkan menjadi media akan perubahan) politik di suatu negara.² Sedangkan menurut Harmassi ada dua tema yang digunakan dalam menjelaskan perkembangan musik populer negara-negara berkembang. Pertama, pencarian identitas adanya sebuah negara. Kedua, kritik terhadap kebijakan-kebijakan suatu negara yang biasanya menggambarkan ketidakpuasan terhadap

¹ J. A. Dunga dan L. Manik, *Musik Di Indonesia Dan Beberapa Persoalannya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1952), hal. 11.

² Craig A. Lockard, *Popular Music And Politics In Modern Southeast Asia*, Jurnal, (Asian Music, vol. 27 no. 2, 1996), hal. 152.

kegagalan suatu negara dalam menyelesaikan permasalahannya, baik di bidang sosial, ekonomi, dan politik.³

Istilah “seni suara” pada mulanya dipakai oleh orang Indonesia untuk menerjemahkan kata “*muziek*” yang berasal dari bahasa Belanda (*musik* dalam bahasa Jerman; *music* dalam bahasa Inggris; *musique* dari bahasa Perancis). Ini disebabkan oleh sentimen dan hasrat mempunyai kata sendiri. Awal mula penggunaan istilah “seni suara” adalah sastrawan Armijn Pane ketika pada zaman penjajahan Jepang.⁴ Istilah “seni suara” ini dirasa kurang cocok, terutama bagi para seniman-seniman yang berkecimpung di dunia musik menghadapi kesulitan ketika menerjemahkan dan menyusun istilah-istilah musik, serta menyusun karangan musik.⁵

Pasca Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, kehidupan politik di Indonesia mulai berubah. Pengakuan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 memberikan pengaruh yang sangat besar. Mereka mulai mencari konsep negara yang akan digunakan tanpa campur tangan negara lain. Berbagai macam cara dalam penerapan konsep negara yang akan diterapkan di Indonesia ternyata masih belum mampu menemukan konsep negara dalam sistem pemerintahan yang cocok dengan kondisi masyarakat saat itu, dengan sistem politik yang sudah mulai menerapkan politik yang bebas dan aktif.⁶

³ Elbaki Harmassi, *The Third World Reassessed*, (Berkeley: University Of California, 1988), hal. 145-146.

⁴ J. A. Dungga dan L. Manik, *Loc cit*, hal. 7.

⁵ J. A. Dungga dan L. Manik, *Loc cit*, hal. 9-10.

⁶ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), hal. 472.

Perkembangan musik di Indonesia pada awal tahun 1950-an merupakan masa dimana musik yang berasal dari negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan Inggris mulai menginjakkan kakinya di Indonesia dan mulai diperdengarkan kepada masyarakat yang disebut musik hiburan atau musik populer (*entertainment music*).⁷ Jenis musik populer seperti *jazz*⁸, *pop*⁹, dan *rock*¹⁰ mulai mendapatkan perhatian di masyarakat, kedatangan musik populer juga merupakan awal dari berdirinya industri musik di Indonesia. Yampolsky berpendapat bahwa “aliran musik yang dengan mudahnya bisa cocok dengan media dan menarik perhatian industri rekaman bisa dikatakan populer”.¹¹ Faktor mengapa musik populer diterima dengan baik oleh industri rekaman dikarenakan musik ini banyak diperdengarkan oleh masyarakat pada saat itu dan juga produktivitasnya dapat memenuhi permintaan media.¹² Salah satunya adalah perusahaan rekaman “Irama”. Perusahaan ini merupakan pelopor perusahaan rekaman di Indonesia yang

⁷ Suzan Piper dan Sawung Jabo, *Musik Indonesia Dari 1950-an Hingga 1980-an*, Jurnal, (Prisma, 1987), hal. 33.

⁸ Jazz mempunyai hukum bahwa musik itu “universal” yang berlaku untuk semua jenis musik. Tetapi bahwa jazz berasal dari bangsa kulit hitam di Amerika. Wujudnya yang menjadi contoh gamblang adalah periode setelah jazz mulai dikenal di New Orleans, lalu di Chicago. Lihat Yapi Tambayong, *Ensiklopedi Musik*, Jilid ke-I, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1992), hal. 260-261.

⁹ Pop, istilah ini di satu pihak merupakan kebahagiaan, karena dengan pop para penggarap bidang musik ini cepat menjadi kaya, di lain pihak merupakan istilah yang mengandung pelecehan karena sepiunya bidang ini mempermasalahkan segi-segi objektif akan bidang “laksmiwidya”. Istilah pop baru populer setelah tahun 1960-an. Lihat Yapi Tambayong, *Ensiklopedi Musik*, Jilid ke-II, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1992), hal. 121.

¹⁰ Rock, suatu corak musik hiburan yang kemudian menjadi serius di tahun 1950-an, yang berangkat dari pola *boogie woogie* sebagai kesinambungan *blues* di satu pihak dan akar *country* di pihak lain. Lihat Yapi Tambayong, *Ibid*, hal. 165.

¹¹ Philip Yampolsky, *Music and Media In The Dutch East Indies: Gramophone Records And Radio In The Late Colonial Era 1903-1942*, Disertasi, (University Of Washington, 1995), hal. 19.

¹² Theodore KS, *Rock 'n Roll Industri Musik Indonesia: Dari Analog Ke Digital*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2013), hal. 28.

mempopulerkan musik-musik Barat sejak tahun 1951 dan juga perusahaan rekaman resmi dari negara yaitu “Lokananta” yang telah didirikan sejak tahun 1955

Perkembangan musik di Indonesia tahun 1950-an juga menjadi ajang bagi para pemuda di Indonesia untuk berpakaian ala orang-orang Barat dan mulai menyukai lagu-lagu yang berasal dari Amerika Serikat dan Inggris yang disiarkan melalui siaran radio atau melalui film-film di Amerika Serikat dan Inggris yang masuk ke Indonesia. *Rock 'n roll* dikenal masyarakat Indonesia melalui film *Rock Around The Clock* yang dibintangi Bill Haley dan His Comets, kemudian melalui lagu-lagu dari Elvis Presley. Kebudayaan Amerika juga telah masuk ke Indonesia melalui piringan hitam yang berisi lagu-lagu *rock 'n roll*. Di tahun 1950-an juga mulai berkembang berbagai kelompok musik dan sering diadakannya festival-festival di beberapa kota besar di Indonesia. Pertumbuhan musisi dan kelompok musik yang sering membawakan lagu-lagu Barat di kalangan pemuda pada saat itu dianggap oleh Soekarno sebagai hal yang negatif bagi kehidupan para pemuda Indonesia, khususnya dalam bidang kebudayaan.¹³

Hubungan antara politik dengan musik Barat saling berkaitan pada akhir tahun 1950-an hingga awal tahun 1960-an. Hal ini bermula pada saat Soekarno berpidato dalam rangka perayaan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1959. Pidato yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dalam sidang “Manifesto Politik Republik Indonesia” tersebut difokuskan pada kebangkitan semangat revolusi, imperialisme dan kolonialisme, serta keadilan sosial ini mulai

¹³ Muhammad Mulyadi, *Industri Musik Indonesia: Suatu Sejarah*, (Bekasi: Koperasi Ilmu Pengetahuan Sosial, 2009), hal. 10-11.

mengancam eksistensi musik-musik Barat yang pada saat itu banyak diperdengarkan oleh para pemuda.¹⁴ Himbauan dari Soekarno pada saat itu untuk tidak mendengarkan lagu-lagu Barat menjadi titik puncak dari sidang Manifesto Politik tersebut.

Soekarno merupakan salah seorang tokoh yang sangat berkontribusi dalam sejarah berdirinya Indonesia. Bisa dibilang ia adalah bapak bangsa, orator, cendekiawan, dan sosok yang sempurna untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Tidak sedikit karya-karya tulis yang menggambarkan peran Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, peran Soekarno ketika menjadi seorang presiden, hingga hal-hal yang bersifat pribadi.¹⁵ Pemikiran-pemikiran Soekarno yang tertuang dalam tulisannya yang menjadi tonggak perjuangan sejarah Indonesia dalam memperebutkan kemerdekaan maupun ketika berkontribusi dalam kebijakan-kebijakan yang ia buat sebagai presiden Indonesia. Salah satu kebijakannya adalah larangan adanya peredaran musik Barat di Indonesia atau yang dikenal dengan musik *ngak-ngik-ngek*.¹⁶

Musik *ngak-ngik-ngek* adalah istilah yang digunakan Soekarno untuk menyebut musik Barat yang dianggapnya merupakan masalah dalam bidang kebudayaan di Indonesia dan juga dianggap merusak identitas bangsa.¹⁷ Musik Barat yang dimaksud dalam hal ini adalah jenis musik *pop*, *jazz*, dan *rock*. Aliran

¹⁴ Ayu Pertiwi, *Larangan Soekarno Terhadap Musik Barat Tahun 1959-1967*, Jurnal, (AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah, vol. 2 no. 3, 2014), hal. 338.

¹⁵ Rhien Soemohadiwidjojo, *Bung Karno Sang Singa Podium*, (Yogyakarta: Second Hope, 2013), hal. 6-7.

¹⁶ *ngak-ngik-ngek*, istilah yang populer yang berasal dari pidato kenegaraan Soekarno mengenai "Manifesto Politik". Istilah ini adalah apa yang disebut dengan "lagu Barat". Lihat Yapi Tambayong, *Loc cit*, hal. 69.

¹⁷ Nurani Soyomukti, *Soekarno: Visi Kebudayaan & Revolusi Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 197.

musik *ngak-ngik-ngek* ini dianggap sebagai musik yang dapat memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pemuda. Musik Barat juga menurut Soekarno sebagai “kontra-revolusioner” karena sangat bertentangan dengan semangat revolusi yang digaungkan Soekarno. Ia menganggap musik *ngak-ngik-ngek* dengan gaya kebarat-baratan menjadi ciri khas baru bagi generasi muda, bersifat “meninabobokan” dengan lirik-lirik lagu yang bertemakan romantisme “cengeng” dan agresif yang nantinya akan melemahkan sifat nasionalisme mereka. Oleh karena itu, Soekarno mengeluarkan “Manifesto Politik Republik Indonesia” pada 17 Agustus 1959 tentang kebudayaan nasional, salah satunya ialah menentang segala sesuatu yang berbau Barat, dalam hal ini musik.¹⁸ Sejak bulan Oktober 1959, masyarakat Indonesia sudah dibatasi untuk tidak mendengar lagi lagu-lagu yang berirama *rock n’ roll*, *cha-cha-cha*¹⁹, dan *mambo*²⁰ di seluruh Radio Republik Indonesia (RRI).²¹

Pada awalnya situasi dan kondisi tahun 1950-an sangat mendukung bagi perkembangan musik-musik Barat yang ada di Indonesia, tetapi kondisinya berubah ketika Soekarno mengubah sistem pemerintahan yang awalnya berupa parlementer menjadi sistem presidensial melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pelarangan terhadap musik Barat ini dilihat secara politis melalui kepentingan nasionalisme yang mengutamakan semangat revolusi dan dikatakan sebagai bagian dari “imperialisme

¹⁸ Susilo Suharto, *Manipol-Usdek*, (Malang: Ichtisar, 1961), hal. 14.

¹⁹ *cha-cha-cha*, irama dansa yang populer di tahun 1950-an dan berasal dari Amerika Latin. Irama ini pernah menjadi topik penting dalam pembahasan kebudayaan Indonesia. Lihat Yapi Tambayong, *Loc cit*, hal. 69.

²⁰ *mambo*, irama dansa yang populer di tahun 1955, berawal dari lagu "Mambo Italiano" ciptaan Bob Merrill. Lihat Yapi Tambayong, *Ensiklopedi Musik*, Jilid ke-II, *Loc cit*, hal. 10.

²¹ Muhammad Mulyadi, *Loc cit*, hal. 11.

kebudayaan”. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Soekarno dalam “Manifesto Politik Republik Indonesia” yang kemudian diputuskan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai “Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)”.²² Pelarangan terhadap musik Barat juga dimanfaatkan PKI pada saat itu melalui Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) untuk menguasai setiap segi kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya melalui kebudayaan. Berikut merupakan salah satu penggalan pidato Soekarno terkait pelarangan musik Barat. Soekarno mengatakan “Kenapa para pemuda banyak yang tidak menentang imperialisme kebudayaan? Kenapa para pemuda masih banyak yang *rock- ‘n-roll rock- ‘n-rollan, dansi-dansian a la cha-cha-cha, musik-musikan, a la ngak-ngik-ngek, gila-gilaan*, dan lainnya?”.²³

Manifesto Politik atau dikenal dengan istilah “Manipol” yaitu salah satu peraturan pemerintah yang berisi strategi politik Indonesia di masa Demokrasi Terpimpin, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.²⁴ Manifesto Politik dinyatakan sebagai program pemerintah yang merupakan *retooling*²⁵ dari pemerintahan sebelumnya. Ada tiga program dari Manifesto Politik yang berupa “Tri Program” yang berisi:

²² Yapi Tambayong, *123 Ayat Tentang Seni*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hal. 104.

²³ Departemen Penerangan RI, *Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959*, (Jakarta: Penerbitan Khusus 76, 1962), hal. 62.

²⁴ Cindy Adams, *Soekarno: Penyambung Lidah Rakyat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1964), hal. 156.

²⁵ *retooling*, istilah yang digunakan Soekarno untuk membersihkan alat-alat revolusi (lembaga negara, partai politik, organisasi massa, dan pikiran rakyat banyak). Lihat Rudi Hartono, “Sering Disebut oleh Sukarno, Apa sih Retooling itu?” dalam <https://www.berdikarionline.com/sering-disebut-oleh-sukarno-apa-sih-retooling-itu/>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2020 jam 22.10 WIB.

- a. Memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya;
- b. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara;
- c. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik di Irian Barat.²⁶

Melihat hal tersebut, lahirlah semacam katekisasi mengenai dasar, tujuan, kewajiban revolusi Indonesia, kekuatan-kekuatan sosial revolusi Indonesia, dan program umum yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Pidato Soekarno yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” itu selalu membahas semangat revolusi yang mengandung lima gagasan.²⁷ Pertama, Undang-Undang Dasar 1945; kedua, Sosialisme ala Indonesia; ketiga, Demokrasi Terpimpin; keempat, Ekonomi Terpimpin; dan kelima, Kepribadian Indonesia. Dengan mengambil huruf pertama masing-masing gagasan itu lahirlah singkatan dari “USDEK”.²⁸

Soekarno menentang segala bentuk imperialisme dan kolonialisme di Indonesia menjadi landasan untuk membuat kebijakan pelarangan musik Barat di Indonesia. Pemerintah pada saat itu ingin melenyapkan pengaruh-pengaruh Barat yang ada di Indonesia, termasuk musik. Musik di Indonesia pada saat itu haruslah musik yang mencerminkan kepribadian Indonesia, serta dapat dijadikan sebagai bagian dari revolusi yang dapat membangkitkan semangat para pemuda Indonesia.

²⁶ Departemen Penerangan RI, *Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia*, (Jakarta: Penerbitan Khusus 166, 1960), hal. 21.

²⁷ Departemen Penerangan RI, *Penemuan Kembali Revolusi Kita (The Rediscovery Of Our Revolution)*, (Jakarta: Penerbitan Khusus 60, 1960), hal. 4.

²⁸ Heni Wijayanti, *Gagasan Sukarno Tentang Demokrasi Terpimpin*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma, 2011), hal. 79.

Relasi Soekarno dengan negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat, Inggris, maupun Uni Soviet yang baik menimbulkan tanda tanya besar. Soekarno memang menentang segala bentuk imperialisme dan kolonialisme di Indonesia, termasuk bidang kebudayaan, tetapi memiliki relasi yang baik. Alasan yang mendasari Soekarno saat itu ialah kenakalan-kenakalan remaja yang sedang marak di negara-negara Barat. Relasi tersebut memberikan Soekarno banyak informasi mengenai perkembangan yang terjadi di negara-negara tersebut. Termasuk kriminalitas yang disebabkan karena musik gila-gilaan yang dibawa oleh “The Beatles”.²⁹ Soekarno tidak ingin membawa hal-hal tersebut ke Indonesia dan memberikan pengaruh buruk terhadap para pemuda.

Soekarno memberikan peringatan keras kepada para musisi dan kelompok musik yang tetap memainkan musik Barat. Tidak sedikit media yang mengecam dampak dari perkembangan musik *ngak-ngik-ngek* bagi para pemuda. Lagu-lagu *pop*, *jazz*, dan *rock* dianggap sebagai musik gila-gilaan yang harus disingkirkan untuk menumbuhkan semangat “Berdikari” (berdiri diatas kaki sendiri) di atas kebudayaan nasional yang berkepribadian Indonesia.³⁰

Pada awal tahun 1963, larangan budaya Barat di Indonesia diperkuat kembali melalui Penpres (Penetapan Presiden) No. 11 tahun 1963 yang melarang peredaran musik Barat, terutama rock yang berasal dari Amerika dan Inggris. Meskipun demikian, unsur-unsur budaya Barat tetap menjamur di Indonesia. Menurut Muhammad Priyono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu,

²⁹ Dieter Mack, *Sejarah Musik*, Jilid ke-IV, (Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi, 1995), hal. 498.

³⁰ Nurani Soyomukti, *Loc cit*, hal. 189.

munculnya musik *rock 'n roll* bersamaan dengan munculnya tari *twist*³¹. Dalam bidang musik tidak hanya iramanya yang ditiru, tetapi juga lirik lagu dan gaya penyanyinya yang cenderung kebarat-baratan. Menghadapi situasi tersebut, Di tahun 1964, pemerintah menegaskan untuk melarang penampilan dan pemutaran piringan-piringan hitam dari musik Barat.³²

Di masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno merupakan presiden sekaligus pemimpin besar revolusi Indonesia, dimana himbauan-himbauan dari sang kepala negara dijadikan sebagai landasan kebijakan-kebijakan yang harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, meskipun tidak ada dasar hukum yang jelas.³³ Melalui pidato-pidatonya, musik Barat dinyatakan sebagai musik terlarang di Indonesia. Pidato Soekarno lainnya yang digunakan dalam pelarangan musik Barat adalah sebagai berikut.

Soekarno mengatakan:

Maka dari itu para pemuda, awas! kalau masih ada sasak-sasakan, *beatkebeatlean*, *rock-and roll-rock-and roll-an* seperti kawanmu yang bernama Koes Bersaudara itu. Apa tidak punya kita lagu sendiri yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia?, kenapa harus meniru “*Elvis Presley, Elvis Presley-an!*”. Lebih baik kita mempunyai lagu yang seperti dinyanyikan Pak Ali.³⁴

Kondisi politik Demokrasi Terpimpin yang lebih menonjolkan kebijakan-kebijakan yang kontra terhadap Barat secara perlahan mulai berkurang pasca meletusnya peristiwa “Gestapu”. Kebijakan tersebut mulai melemah seiring PKI

³¹ *twist*, irama dansa yang populer pada tahun 1962-1963, melalui lagu yang diciptakan oleh Chubby Checker berjudul *The Twist*. Lihat Yapi Tambayong, *Loc cit*, hal. 302.

³² Muhammad Mulyadi, *Loc cit*, hal. 13-14.

³³ Dieter Mack, *Loc cit*, hal. 500.

³⁴ Iman Toto K. Rahardjo, *Bung Karno Gerakan Massa Dan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hal. 40-41.

dicap sebagai partai terlarang dan tidak boleh aktif kembali. TNI memulai operasi-operasi penangkapan terhadap tokoh-tokoh serta simpatisan PKI. Dalam operasi ini, TNI memerlukan bantuan masyarakat. TNI beralasan bahwa mereka membutuhkan bantuan masyarakat serta merta untuk membantu mereka dalam melakukan operasi ini, dalam hal tersebut, mereka memandang TNI harus bekerja sama dengan masyarakat, TNI menggunakan musik sebagai sarana pengintegrasian mereka. Kemudian TNI mengadakan berbagai pertunjukan yang pada saat itu dikenal dengan nama “Panggung Prajurit”³⁵ yang dikoordinasikan bersama BKS-Kostrad³⁶. Kebijakan Kostrad mengajak para musisi maupun kelompok musik di masa Demokrasi Terpimpin dilarang tampil merupakan suatu upaya merubah stigma yang melekat pada masyarakat saat itu yaitu pelarangan musik Barat.³⁷

Perubahan stigma tersebut telah mengurangi kekuatan pemerintah dan munculnya kekuatan baru, dengan TNI sebagai pemeran utamanya. TNI melihat para musisi dan kelompok musik sebagai alat revolusi mereka untuk memasuki dunia perpolitikan. Hal itu tercermin dari ucapan Brigjen Amir Machmud yang ketika itu menjabat sebagai Pangdam V Djaya, ia mengatakan: “Bahwa bukan hanya partai politik saja yang berhak berpolitik, tetapi semua alat revolusi harus ikut berpolitik, termasuk musik”.³⁸

³⁵ panggung prajurit, istilah ini digunakan para TNI untuk menyelenggarakan suatu pertunjukan. Lihat Muhammad Mulyadi, *Loc cit*, hal. 20.

³⁶ BKS-Kostrad, singkatan dari Badan Kerjasama Seniman-Komando Strategis Tjadangan Angkatan Darat, adalah badan yang paling aktif bergerak dalam bidang hiburan musik pasca Gestapu. Lihat Muhammad Mulyadi, *Loc cit*, hal. 20.

³⁷ Muhammad Mulyadi, *Loc cit*, hal. 21.

³⁸ Muhammad Mulyadi, *Loc cit*, hal. 21.

Sebenarnya TNI dan para musisi maupun berbagai kelompok musik sangat membutuhkan satu sama lain untuk kepentingannya masing-masing, musisi-musisi dan para kelompok musik tersebut memerlukan TNI untuk mengungkapkan kebebasan berekspresi yang tidak diperlihatkan selama masa Demokrasi Terpimpin. Karena TNI pada saat itu tidak mempermasalahkan apakah musik yang dibawakan adalah musik Barat atau bukan terhadap jenis musik yang ditampilkan dalam panggung. Selain itu dengan dekatnya musisi maupun kelompok musik bersama TNI telah dirasakan memberikan jaminan keamanan bagi musisi dan kelompok musik tersebut. Musik sebagai media politik mereka masih nampak jelas di masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Di masa awal-awal terbentuknya Orde Baru, TNI banyak sekali memegang peran penting dalam perkembangan musik Barat kedepannya melalui BKS-Kostrad dengan banyak menyelenggarakan pertunjukan “panggung prajurit”. Tujuan diadakannya panggung prajurit adalah untuk mensukseskan TNI dengan masyarakat dalam operasi penangkapan anggota maupun simpatisan PKI di berbagai daerah.³⁹

Di sisi lain, kebijakan Soekarno dalam kebudayaan juga telah berdampak positif bagi pengembangan lagu-lagu daerah. Musisi-musisi dari kelompok musik lebih banyak membuat, menyanyikan, dan memainkan lagu-lagu *pop* daerah. Teruna Ria mempopulerkan “Bengawan Solo” ciptaan Gesang dengan rekaman yang berirama *pop keroncong*. Kemudian Taboneo membawakan lagu-lagu *pop Kalimantan* dengan lagunya yang terkenal berjudul “Ampar-Ampar Pisang” dan “Saputangan Bapuncu Ampa”. Gumarang dengan *pop Minang*, lagunya yang

³⁹ Muhammad Mulyadi, *Loc cit*, hal. 22.

terkenal adalah “Ayam den Lapeh” dengan penyanyinya yaitu Nurseha; Elly Kasim dengan lagu “Bareh Solok”, “Lamang Tapai”, dan “Hitam Manih”. Pop Ambon diwakili oleh Bob Tutupoly dengan lagunya “Sarinande”, pop Makassar lewat Lenny Beslar dengan lagunya “Angin Mamiri”, Kris Biantoro muncul dengan lagunya “Don Dong Opo Salak” yang berirama pop Jawa. Sementara itu, pop Sunda diawali oleh Lilis Suryani dengan lagunya yang terkenal berjudul “Es Lilin” dan “Neng Geulis”; Diah Iskandar dengan lagu “Beas Beureum”.⁴⁰

Melihat hal tersebut, penelitian ini mengulas secara spesifik pelarangan musik Barat di masa Demokrasi Terpimpin, khususnya kebijakan-kebijakan yang dibuat Soekarno yang secara langsung membuat para musisi dan kelompok musik yang selalu membawakan lagu-lagu Barat merasakan dampaknya, beberapa diantaranya bahkan ditahan dan alat-alat musik mereka “dibredel” dan dihancurkan. Studi pustaka ini dalam mengungkapkan kebijakan Soekarno terhadap musik Barat secara narasi dalam memunculkan kronologis peristiwanya. Di samping itu, perspektif *in the group* menjadi acuan penulis dalam penelitian ini yang dimana perspektif ini menggunakan ruang lingkup lingkungan pemerintahan di masa Demokrasi Terpimpin. Secara kronologis, penelitian ini dimulai pada tahun 1959 dimana mulai dijalankannya pemerintahan Demokrasi Terpimpin pasca Dekrit Presiden hingga mulai melemahnya kekuasaan Soekarno pasca “Gestapu” pada tahun 1965.

Adapun maksud dari penelitian ini adalah menelusuri, mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan-kebijakan Soekarno terhadap Musik Barat. Selain itu,

⁴⁰ Muhammad Mulyadi, *Loc cit*, hal. 16-17.

penulis tertarik mengupas pelarangan musik Barat oleh Soekarno karena Soekarno sendiri benci terhadap hal-hal yang berbau Barat, padahal hubungan Soekarno dengan negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat, Inggris, maupun Uni Soviet terbilang harmonis. Melihat hal tersebut, penulis ingin menggali lebih dalam mengenai pelarangan musik Barat tersebut. Sesuai dengan latar belakang di atas, penulis telah menentukan judul penelitian ini yaitu **“Kebijakan Soekarno Terhadap Musik Barat Tahun 1959-1965”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, akhirnya penulis pun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana situasi dan kondisi politik yang melatarbelakangi kebijakan Soekarno terhadap musik Barat?
2. Bagaimana kebijakan-kebijakan Soekarno terhadap musik Barat Tahun 1959-1965?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan sebelumnya, maka penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui situasi dan kondisi politik yang melatarbelakangi kebijakan Soekarno terhadap musik Barat;
2. Mengetahui kebijakan-kebijakan Soekarno terhadap musik Barat Tahun 1959-1965.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk penelitian sejarah diperlukan tinjauan pustaka untuk memperkuat makna peristiwa yang sudah terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Tinjauan pustaka merupakan tinjauan terhadap buku, dokumen, maupun karya tulis yang mendukung peneliti untuk menganalisis penelitiannya.⁴¹ Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk memperkaya bahan rujukan peneliti dalam menulis penelitiannya sehingga diperoleh hasil penelitian yang komprehensif sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

1. *Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959* karya Departemen Penerangan RI. Buku ini menjelaskan terkait hasil Manifesto Politik yang salah satunya terkait dengan pelarangan musik barat oleh Soekarno. Ini digunakan sebagai rujukan utama dalam penelitian yang penulis lakukan;
2. *Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia* karya Departemen Penerangan RI. Buku ini menjelaskan pedoman-pedoman pelaksanaan terjadinya Manifesto Politik;
3. *Penemuan Kembali Revolusi Kita (The Rediscovery Of Our Revolution)* karya Departemen Penerangan RI. Buku ini menceritakan pidato Soekarno mengenai “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang menjadi dasar dari pelarangan musik Barat;

⁴¹ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 19.

4. *Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi* karya Departemen Penerangan RI. Buku ini menggambarkan tujuh bahan pokok indoktrinasi seperti Manipol-USDEK, Garis-Garis Besar Haluan Negara, Penemuan Kembali Revolusi Kita, dan juga berbagai pasal-pasal dan aturan di masa Demokrasi Terpimpin;
5. *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid ke-I dan ke-II* karya Soekarno. Buku ini menjelaskan seluk beluk pemikiran Soekarno, termasuk pemikiran Soekarno selama Demokrasi Terpimpin berlangsung. Jilid ke-I menceritakan pemikiran Soekarno muda hingga sebelum kemerdekaan, sedangkan jilid ke-II menjelaskan pemikiran Soekarno pasca kemerdekaan hingga lengsernya dari tampuk kekuasaan;
6. *Musik di Indonesia dan Beberapa Persoalannya* karya J. A. Dungga dan L. Manik. Buku ini menggambarkan persoalan musik di Indonesia dari masa kolonial hingga pasca Demokrasi Terpimpin runtuh;
7. *Analisis Musik Indonesia* karya Amir Pasaribu. Buku ini menjelaskan mengenai analisis dunia musik di Indonesia yang diadopsi langsung oleh salah satu seniman di tahun 1960-an, yaitu Amir Pasaribu;
8. *Industri Musik Indonesia: Suatu Sejarah* karya Muhammad Mulyadi. Buku yang sebelumnya merupakan tesis dari sang penulis ini menjelaskan sejarah perindustrian musik di Indonesia dari Orde Lama hingga sekitar tahun 1985. Ini digunakan sebagai acuan dalam melihat kronologis musik Barat masa Demokrasi Terpimpin;

9. *Rock 'n Roll: Industri Musik Indonesia* karya Theodore KS. Buku ini menjelaskan sejarah musik bergenre “rock” di Indonesia. Sama dengan sebelumnya, ini juga digunakan sebagai acuan dalam melihat kronologis musik Barat masa Demokrasi Terpimpin;
10. *Sejarah Musik Jilid ke-IV* karya Dieter Mack. Buku ini menjelaskan terkait sejarah perkembangan musik di dunia dari pasca Perang Dunia II hingga saat ini;
11. *123 Ayat Tentang Seni* karya Yapi Tambayong. Buku yang ditulis oleh Yapi Tambayong, atau yang lebih dikenal dengan nama Remy Sylado ini menjelaskan berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan seni, termasuk di dalamnya yaitu seni musik;
12. *Ensiklopedi Musik Jilid ke-I dan ke-II* karya Yapi Tambayong. Buku yang lebih dikenal dengan ensiklopedia ini pun menjelaskan dari A sampai Z mengenai semua tentang dunia musik;
13. *Music and Politics* karya John Street. Buku ini menjelaskan keterkaitan antara musik dengan politik hingga seluk-beluk keterkaitannya;
14. *Dance Of Life: Popular Music and Politics in Southeast Asia* karya Craig A. Lockard. Buku yang awalnya merupakan jurnal ini menjelaskan tentang keterkaitan musik-musik yang populer dengan politik di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia;
15. *Culture, Power, and Authoritarianism in The Indonesian State: Cultural Policy Across The Twentieth Century to The Reform Era (terjemahan. oleh Edisius Riyadi Terre)* karya Tod Jones. Buku yang ditulis oleh Tod

Jones ini menceritakan terkait kebijakan dalam bidang budaya (termasuk musik) dari awal abad ke-20 hingga masa reformasi, termasuk juga di masa Demokrasi Terpimpin;

16. *Harian Rakjat edisi khusus tanggal 1 Mei 1963 tahun ke-XIII no. 3398.*

Surat kabar ini menjelaskan terkait situasi dan kondisi politik masa Demokrasi Terpimpin;

17. *Seni Musik Sebagai Alat Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin*

(1959-1965): Suatu Studi Kasus karya Sylvia Yulita. Skripsi yang dimiliki oleh Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini menjelaskan mengenai musik sebagai alat “propaganda” Soekarno untuk melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Skripsi ini digunakan untuk membantu penulis dalam penelitian ini dan juga menjadi pembanding dari referensi-referensi utama yang digunakan penulis;

18. *Music and Media In The Dutch East Indies: Gramophone Records And*

Radio In The Late Colonial Era 1903-1942 karya Philip Yampolsky. Disertasi ini menjelaskan keberadaan musik-musik Barat maupun perusahaan-perusahaan rekaman dan radio di Hindia Belanda di tahun 1903-1942;

19. *Larangan Soekarno Terhadap Musik Barat Tahun 1959-1967* karya

Ayu Pertiwi. Jurnal yang diterbitkan oleh AVATARA ini menjelaskan terkait pelarangan musik Barat tahun 1959-1967, jurnal ini digunakan sebagai pembanding skripsi penulis;

20. Selanjutnya yaitu berbagai macam artikel, baik yang berasal dari surat kabar maupun yang beredar di internet yang membahas terkait Musik dan Politik, maupun yang membahas terkait pelarangan musik Barat di Indonesia.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode historis sebagai metode penelitiannya dan menggunakan teknik studi literatur sebagai teknik penelitiannya. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode historis adalah proses menganalisis rekaman peninggalan peristiwa masa lalu termasuk metode dalam menggali, memberi penilaian, mengartikan serta menafsirkan fakta yang ada untuk kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan dari peristiwa tersebut.⁴² Metode ini terdiri dari empat tahap, yaitu Heuristik (pencarian sumber-sumber sejarah), Kritik (penilaian sumber), Interpretasi (penafsiran sejarah), dan Historiografi (penulisan sejarah). Adapun yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Heuristik

Tahap pertama dalam penelitian sejarah adalah mencari dan mengumpulkan sumber yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Proses pengumpulan sumber dalam penelitian sejarah dinamakan *Heuristik*. Heuristik yaitu pencarian dan pengumpulan sumber sejarah yang sesuai dengan masalah yang akan diangkat

⁴² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hal. 63.

oleh peneliti. Cara yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan sumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Secara sederhana sumber sejarah dapat berupa: sumber benda, sumber tertulis dan sumber lisan. Selain itu, sumber dapat diklasifikasikan dalam sumber primer dan sumber sekunder.⁴³

Terkait dengan jenis penelitian, penelitian ini termasuk studi pustaka. Sehingga pencarian sumber pustaka menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Selain itu, penulis menggunakan sumber benda berbentuk Audio Visual (Video) sehingga sumber ini difungsikan untuk lebih menguatkan sumber-sumber yang telah digunakan. Dalam proses pencarian sumber-sumber ini, sebagian besar berasal dari koleksi pribadi dan kunjungan ke Perpustakaan Batu Api yang berada di Jatinangor. Penulis berhasil mengumpulkan beberapa sumber primer maupun sekunder, yaitu:

a. Sumber Primer

1) Buku

- a) Departemen Penerangan RI. 1964. *Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi*. Jakarta: Jajasan Prapantja;
- b) Departemen Penerangan RI. 1962. *Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959*. Jakarta: Penerbitan Khusus 76;
- c) Departemen Penerangan RI. 1960. *Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia*. Jakarta: Penerbitan Khusus 166;

⁴³ Sulasman, *Teori Dan Metodologi Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 93-94.

- d) Departemen Penerangan RI. 1960. *Penemuan Kembali Revolusi Kita (The Rediscovery Of Our Revolution)*. Jakarta: Penerbitan Khusus 60;
- e) Soekarno. 1964. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jilid ke-I. Jakarta: Panitia Di Bawah Bendera Revolusi;
- f) Soekarno. 1965. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jilid ke-II. Jakarta: Panitia Di Bawah Bendera Revolusi;

2) Surat Kabar

- a) Harian Rakjat. Tahun ke-XIII no. 3398. tanggal 1 Mei 1963 (edisi khusus).

b. Sumber Sekunder

1) Buku

- a) Airlangga Pribadi Kusman, Benedict Anderson, Bonnie Setiawan, Mastono, Max Lane, dan Rudi Hartono. 2016. *Sukarno, Marxisme, Dan Bahaya Pemfosilan*. Jakarta: IndoPROGRESS;
- b) Alexander Supartono. 2000. *Lekra vs Manikebu: Perdebatan Kebudayaan Indonesia 1950-1965*. Jakarta: STF Driyarkara.
- c) Amir Pasaribu. 1986. *Analisis Musik Indonesia*. Jakarta: PT. Pantja Simpati;
- d) Craig A. Lockard. 1998. *Dance Of Life: Popular Music and Politics in Southeast Asia*. Honolulu: University Of Hawaii;
- e) Cindy Adams. 1964. *Soekarno: Penyambung Lidah Rakyat*.

Jakarta: Gunung Agung;

- f) D. S. Moeljanto dan Taufik Ismail. 1995. *Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI Dkk. (Kumpulan Dokumen Pergolakan Sejarah)*. Bandung: Mizan.
- g) Dieter Mack. *Sejarah Musik*. Jilid ke-IV. Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi;
- h) J. A. Dungga dan L. Manik. 1952. *Musik di Indonesia dan Beberapa Persoalannya*. Jakarta: Balai Pustaka;
- i) Jennifer Lindsay dan Maya H. T. Liem. 2011. *Ahli Waris Budaya Dunia: Menjadi Indonesia 1950-1965*. Denpasar: Pustaka Larasan;
- j) John Street. 2012. *Music & Politics*. Cambridge: Polity Press;
- k) Muhammad Mulyadi. 2009. *Industri Musik Indonesia: Suatu Sejarah*. Bekasi: Koperasi Ilmu Pengetahuan Sosial;
- l) Nazaruddin Sjamsuddin. 1988. *Soekarno: Pemikiran Politik Dan Kenyataan Praktek*. Jakarta: CV. Rajawali;
- m) Nurani Soyomukti. 2010. *Soekarno: Visi Kebudayaan & Revolusi Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media;
- n) Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan. 2008. *Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965*. Yogyakarta: Merakesumba;
- o) Susilo Suharto. 1961. *Manipol-Usdek*. Malang: Ichtisar;
- p) Theodore KS. 2013. *Rock 'n Roll: Industri Musik Indonesia*.

Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara;

- q) Tod Jones. 2015. *Culture, Power, and Authoritarianism in The Indonesian State: Cultural Policy Across The Twentieth Century to The Reform Era (terjemahan oleh Edisius Riyadi Terre)*.

Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia;

- r) Wagiono Sunarto. 2013. *Perang Karikatur: Mengangkat Dan Menjatuhkan Soekarno Tinjauan Sejarah 1959-1967*. Jakarta: Pascasarjana IKJ.

- s) Yapi Tambayong. 2012. *123 Ayat Tentang Seni*. Bandung: Nuansa Cendekia.

- t) Yapi Tambayong. 1992. *Ensiklopedi Musik*. Jilid ke-I. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka.

- u) Yapi Tambayong. 1992. *Ensiklopedi Musik*. Jilid ke-II. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka.

2) Majalah

- a) Tempo. 2013. *Lekra Dan Geger 1965*. Jakarta: Tempo.
- b) Tempo. tanpa tahun terbit. *Njoto: Peniup Saksofon Di Tengah Prahara*. Jakarta: Tempo.

3) Surat Kabar

- a) Bintang. no. 75 minggu pertama Agustus 1992. *Pola Musik Kita Adalah Musik Tradisional*;
- b) Bintang Indonesia. Harry Tjahjono. no. 123 tanggal 23 Juni 1993. *Balada Koes Bersaudara: Masuk Bui Dengan Melanggar*

Penpres No. 11/1963.

- c) Kompas. tanggal 28 Juli 2002. *Diah Iskandar: Connie Francis Yang “Fals”*;
- d) Kompas, Frans Sartono, tanggal 2 Juli 2010, *Koes “Plus” Pusaran Sejarah*;
- e) Kompas. Theodore KS. 2003. *Meniti Jejak Tony Koeswoyo*;
- f) Pikiran Rakyat. Tok Suwanto. tanggal 13 Juni 2001. *Benteng Budaya “Lokananta” Makin Rapuh*;
- g) Tempo. Heri Priyatmoko. tanggal 4 Mei 2014. *Senjakala Lokananta.*

4) Karya Tulis (Jurnal, Skripsi, Artikel dsb)

- a) Ayu Pertiwi. 2014. *Larangan Soekarno Terhadap Musik Barat Tahun 1959-1967*. AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah vol. 2 no. 3;
- b) Bandung Mawardi. tanpa tahun terbit. *Politikisme Lagu*. tanpa penerbit;
- c) Craig A. Lockard. 1996. *Popular Music And Politics In Modern Southeast Asia*. Asian Music. vol. 27 no. 2;
- d) Heni Wijayanti. 2011. *Gagasan Sukarno Tentang Demokrasi Terpimpin*. Yogyakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma;
- e) Ivan A. Hadar. tanpa tahun terbit. *Musik dan Politik*. tanpa penerbit;

- f) J. A. Dunga. tanpa tahun terbit. *Musik Di Indonesia Dewasa Ini*. tanpa penerbit;
- g) Kyle Gann. *Making Marx In The Music: A Hyperhistory Of New Music and Politics* dalam <https://nmbx.newmusicusa.org/making-marx-in-the-music-a-hyperhistory-of-new-music-and-politics/>;
- h) Philip Yampolsky. tanpa tahun terbit. *Music and Media In The Dutch East Indies: Gramophone Records And Radio In The Late Colonial Era 1903-1942*. University Of Washington;
- i) Suzan Piper dan Sawung Jabo. 1987. *Musik Indonesia Dari 1950-an Hingga 1980-an*, Prisma;
- j) Sylvia Yulita. 1989. *Seni Musik Sebagai Alat Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965): Suatu Studi Kasus*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia;
- k) TH Sumartana. tanpa tahun terbit. *Sukarno Ya Sukarno*. tanpa penerbit;
- l) Utan Parlindungan. 2014. *Mitos Genjer-Genjer: Politik Makna Dalam Lagu*. JSP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. vol. 17 no. 3;
- m) Wannofri Samry, Novi Yeni, dan Maizufri. 2000. *Perlawanan Terhadap Komunis: Manifes Kebudayaan vs Lembaga Kebudayaan Rakyat 1963-1964*. Fakultas Sastra Universitas Andalas. vol. 1 no. 6.

5) Sumber Benda (Audio Visual)

- a) Interview Kick Andy terhadap Koes Bersaudara dalam episode “Fakta Koes Bersaudara Dimasukkan Ke Penjara” yang didokumentasikan tahun 2008;
- b) Video Musik dari Elvis Presley berjudul “*Jailhouse Rock*” yang dirilis tahun 1957;
- c) Video Musik dari The Beatles berjudul “*I Want To Hold Your Hand*” yang dirilis tahun 1964;
- d) Video Musik dari The Blue Diamonds berjudul “*Ramona*” yang dirilis tahun 1960;
- e) Video Musik dari The Tielman Brothers berjudul “*Rollin Rock*” yang dirilis tahun 1960.

Selain itu, beberapa koleksi pribadi berupa buku ataupun *ebook* yang menjelaskan situasi dan kondisi politik masa Demokrasi Terpimpin maupun kebijakan-kebijakannya. Maka dari itu, dapat dikatakan buku-buku ataupun *ebook* tersebut adalah sumber-sumber tersier bagi penelitian ini. Pencarian sumber juga (untuk artikel, jurnal, makalah, dan karya tulis lainnya) diintensifkan di internet dan situs-situs *free source* yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga beberapa sumber yang berasal dari internet terkait dengan pelarangan musik Barat bisa didapatkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kritik

Setelah mengumpulkan sumber sejarah untuk keperluan penelitian, selanjutnya adalah verifikasi keabsahan sumber sejarah atau kritik. Kritik merupakan cara untuk memfiltrasi sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Melalui upaya verifikasi tersebut, peneliti memilih dan memilah data-data yang benar-benar dibutuhkan dan kemudian dijadikan sumber data untuk mendukung penelitiannya, sedangkan data lain yang kurang dibutuhkan peneliti tidak akan digunakan sebagai sumber.⁴⁴

Kritik dibagi menjadi dua macam, yaitu, kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern berkaitan dengan orisinalitas atau keaslian sumber tersebut. Kritik ini bertujuan untuk menganalisis apakah sumber-sumber yang diperoleh merupakan sumber primer atau hanya sumber sekunder. Kritik ekstern juga berupaya meneliti utuh atau tidaknya sumber-sumber yang diperoleh. Kritik ekstern pada umumnya meneliti sumber-sumber sejarah berdasarkan gaya tulisan, bahasa, warna kertas, serta bentuk fisik dan jenis kertas berupa buku, dokumen, maupun karya tulis yang akan digunakan peneliti sebagai sumber. Sedangkan kritik intern lebih dipusatkan pada isi atau pesan yang disampaikan pada sumber tersebut, apakah sezaman atau tidak.⁴⁵

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern merupakan tahapan awal dalam melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek “luar” sumber sejarah. Sebelum semua kesaksian

⁴⁴ Sulasman, *Ibid*, hal. 101.

⁴⁵ I Gede Widja, *Sejarah Lokal: Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1989), hal. 24.

yang berhasil dikumpulkan oleh sejarawan atau peneliti sejarah dapat digunakan untuk merekonstruksi masa lalu, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan yang ketat.⁴⁶ Tujuannya adalah untuk menentukan apakah sumber yang akan digunakan asli dan dapat dipercaya atau tidak. Menurut E. Kosim (1984; 39-40) dan Nina Herlina (2008; 25-30), ada tiga pertanyaan yang diajukan untuk menentukan kelayakan sumber yang digunakan, adalah sebagai berikut:⁴⁷

1) Apakah sumber itu merupakan sumber yang dikehendaki?

Pertanyaan ini memiliki keterkaitan dengan keaslian sumber sejarah yang digunakan, apakah asli atau palsu. Dalam penelitian ini, penulis meneliti sumber-sumber sejarah dengan mengidentifikasi kapan ditulis dan diterbitkannya sumber tersebut, serta identifikasi terhadap tulisan tangan maupun bahasa yang digunakan.

Pada sumber-sumber sejarah yang digunakan dapat dikatakan sebagai sumber yang lulus uji. Dimulai dari buku Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959, Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia, Penemuan Kembali Revolusi Kita (*The Rediscovery Of Our Revolution*), dan Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi, maupun Di Bawah Bendera Revolusi (jilid I dan II), serta berbagai surat kabar maupun majalah kemungkinan besar adalah sumber primer yang lulus uji karena sezaman dengan masa Demokrasi Terpimpin, walaupun sebagian sumber-sumber yang digunakan telah melalui tahapan digitalisasi.

2) Apakah sumber itu asli atau turunan?

⁴⁶ Sulasman, *Op cit*, hal. 102.

⁴⁷ Ading Kusdiana dan Samsudin, *Panduan Penyusunan Dan Penulisan Skripsi Sejarah Dan Peradaban Islam*, (Bandung: Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015), hal. 30-31.

Pertanyaan ini berkaitan dengan bentuk fisik yang digunakan dalam sumber tersebut. Sumber-sumber primer yang digunakan merupakan sumber asli karena sumber tersebut ditulis dan diterbitkan dalam medio 1960an yang artinya sumber tersebut dapat dipertahankan keasliannya, walaupun sebagian dari sumber-sumber itu sendiri telah melalui tahapan digitalisasi. Namun dilihat dari bentuk fisik sumber-sumber sejarah yang digunakan, maka sumber tersebut adalah asli.

3) Apakah sumber itu utuh atau telah berubah-ubah?

Pertanyaan ini memiliki keterkaitan untuk mengungkapkan keutuhan dari sumber yang digunakan atau sumber yang didapatkan telah mengalami perubahan. Sumber-sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber yang masih utuh berkaitan dengan bentuk dan isi tulisan yang digunakan. Sumber-sumber tersebut hanya mengalami perubahan pada bentuk fisiknya.

Dari segi fisik, tinta-tinta yang sudah mulai memudar dan bentuk kertas yang sudah kusam menandakan bahwa buku, surat kabar, dan majalah tersebut adalah asli dan hanya bagian luarnya saja yang sedikit kusam karena memang sudah lama dibuat. Tetapi isinya masih lengkap, tidak ada yang hilang dari lembaran-lembarannya.

Maka bahwa sumber-sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya karena sumber-sumber tersebut ditulis dan diterbitkan sezaman dengan masa ketika kebijakan Soekarno tersebut dibuat, sehingga sumber-sumber tersebut dapat digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

b. Kritik Intern

Kritik intern merupakan pengujian terhadap isi sumber dan kritik terhadap penyampaian isi sumber tersebut. Kritik intern menekankan aspek “dalam”, yaitu “isi” dari sumber dan kesaksian. Setelah fakta kesaksian (*fact of testimony*) ditegakkan melalui kritik ekstern, sejarawan atau peneliti sejarah mengadakan evaluasi terhadap kesaksian itu. Ia harus memutuskan kesaksian itu dapat diandalkan (*reliable*) atau tidak. Keputusan itu didasarkan atas penemuan dua penyidikan (inkuiri).⁴⁸ Tujuan dari kritik intern adalah untuk menjawab pertanyaan: Apakah sumber yang diperoleh merupakan sumber yang kredibel atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut mengutip apa yang dikemukakan oleh E. Kosim (1984: 40-42) dan Nina Herlina (2008: 30-36), langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Melakukan penilaian intrinsik terhadap sumber yaitu:
 - a) Melakukan penilaian terhadap sifat sumber: Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber tulisan saja karena penulis menggunakan teknik studi pustaka dalam menggarap penelitian ini. Sumber primer tersebut menurut penilaian penulis memiliki keterkaitan satu sama lainnya karena sumber tersebut ditulis dan diterbitkan sezaman dengan peristiwa ketika Soekarno mengeluarkan kebijakan terhadap musik Barat itu sendiri;
 - b) Menyoroti pengarang sumber, yang meliputi: Pertama, apakah ia mampu untuk memberikan kesaksian? Untuk menjawab pertanyaan

⁴⁸ Sulasman, *Loc cit*, hal. 104.

⁴⁹ Ading Kusdiana dan Samsudin, *Op cit*, hal. 31.

ini, telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan studi pustaka, jadi pengarang sumber yang penulis jelaskan hanya sebatas pengarang sumber-sumber primer. Pengarang sumber mampu memberikan kesaksian karena kesaksian yang mereka ungkapkan (dalam hal ini Departemen Penerangan RI) tertuang dalam beberapa karya tulis seperti Manifesto Politik RI, Penemuan Kembali Revolusi Kita, dan Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi. Selanjutnya apakah ia mampu menyampaikan kebenaran? Untuk menjawab pertanyaan kedua ini pengarang sumber mampu memberikan kebenaran sesuai yang ia tulis dalam sumber-sumber primer yang penulis dapatkan. Kesemua dari dua pertanyaan ini sangat bergantung pada: 1) Kehadiran saksi di waktu peristiwa itu terjadi, 2) Keahlian saksi, dan 3) Kedekatan saksi dengan peristiwa. Tiga unsur tersebut menjadi kriteria dari sumber primer yang didapatkan penulis yaitu Departemen Penerangan RI yang menjadi saksi atas peristiwa ketika Soekarno mengeluarkan kebijakan terhadap musik Barat. Kemudian kedua, apakah ia mampu memberikan kesaksian yang benar dan apakah ia mau untuk menyampaikan kebenaran? Untuk menjawab pertanyaan ini, pengarang-pengarang dalam sumber primer penelitian ini menuangkan kesaksiannya yang mereka alami dalam beberapa tulisan-tulisan yang mereka terbitkan.

2) Komparasi sumber/Membanding-bandingkan sumber

Komparasi dilakukan dengan cara membanding-bandingkan setiap sumber yang didapatkan. Untuk penelitian ini penulis membandingkan sumber-sumber tertulis, terutama sumber primer yang penulis dapatkan dengan sumber-sumber tertulis yang menjelaskan terkait kebijakan Soekarno terhadap musik Barat.

3) Korborasi/Pendukung antar sumber

Korborasi dilakukan dengan cara menguraikan fakta-fakta sejarah yang ditemukan dari setiap sumber. Tujuan adanya korborasi itu sendiri adalah untuk menemukan keterkaitan antar sumber dalam menjelaskan fakta-fakta sejarah yang diteliti sehingga dengan melaksanakan tahapan korborasi dapat menguraikan fakta-fakta sejarah yang ditemukan dalam setiap sumber yang penulis dapatkan. Dalam hal ini, penulis melakukan korborasi dengan antara sumber-sumber tertulis (dalam hal ini sumber primer) dengan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan kebijakan Soekarno terhadap musik Barat. Penulis menemukan fakta sejarah bahwa Soekarno melakukan pelarangan terhadap musik Barat atas dasar ketidaksukaannya terhadap segala bentuk kolonialisme dan imperialisme, serta ia khawatir akan efek dari musik Barat tersebut yang bisa “meninabobokan” generasi muda saat itu.

Selain itu, sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai penopang utama bagi penelitian ini. Sehingga sumber sekunder tersebut dapat membantu penulisan ini menjadi tulisan yang baik dan benar.

Setelah melakukan proses tahapan kritik ekstern dan intern maka dapat diketahui bahwa sumber-sumber primer yang penulis dapatkan dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya. Sehingga sumber-sumber primer tersebut layak dijadikan sebagai sumber primer dalam penelitian ini.

3. Interpretasi

Setelah dilakukan verifikasi sumber, maka langkah selanjutnya ialah interpretasi. Interpretasi adalah cara peneliti menetapkan hubungan antara fakta-fakta yang sebelumnya telah dikumpulkan.⁵⁰ Interpretasi perlu dilakukan ketika telah mengumpulkan fakta-fakta dari suatu peristiwa dalam berbagai aspek kehidupan. Penulis mencoba menghubungkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan sebelumnya dan melakukan distansiasi untuk memperkecil subjektifitas. Dalam hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis akan memaparkan sedikit mengenai kedua konsep tersebut.

Konsep yang pertama yaitu tentang kebijakan Soekarno terhadap musik Barat. Telah diketahui sebelumnya bahwa Soekarno sangat membenci sekali hal-hal yang berhubungan dengan Barat, terutama musik. Soekarno pernah menyebutkan bahwa ia membenci musik Barat. Alasan Soekarno membenci hal-hal yang berbau Barat karena itu bisa menghancurkan nasionalisme bangsa dan mengancam kebudayaan-kebudayaan daerah.

Konsep yang kedua yaitu di tahun 1959-1965, mengapa dipilih tahun 1959? Karena di tahun 1959 dimulainya masa Demokrasi Terpimpin. Dimulai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membahas mengenai pengembalian rancangan dasar negara yang semula dari UUDS 1950 kembali menjadi UUD 1945. Dan pada tanggal 17 Agustus 1959, diadakannya sidang oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang nantinya akan mengeluarkan Manifesto Politik yang dimana itu

⁵⁰ Nugroho Notosusanto, *Norma-Norma Dasar Penelitian Dan Penulisan Sejarah*, (Jakarta: Pusat Sejarah ABRI DEPHANKAM, 1971), hal. 17.

menjadi patokan munculnya periode Demokrasi Terpimpin. Selain itu, Soekarno berpidato mengenai “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dan berbicara mengenai imperialisme Barat yang waktu itu sudah sangat menjamur di Indonesia. Soekarno juga berbicara bahwa ia sangat membenci hal-hal yang berbau Barat karena itu hanya akan “meninabobokan” para pemuda dengan syair-syair romantisme “cengeng” dan agresif yang nantinya akan melemahkan sikap nasionalisme mereka.

Mengapa penulis mencantumkan hingga tahun 1965? Sebetulnya masa Demokrasi Terpimpin benar-benar berakhir di tahun 1968 ketika Soekarno mulai lengser dan digantikan oleh Soeharto. Kekuasaan Soekarno mulai goyah pasca meletusnya peristiwa “Gestapu”. Hal itu dimanfaatkan TNI dalam operasi penumpasan anggota-anggota PKI dengan meminta bantuan masyarakat, salah satu media penghubung antara TNI dengan masyarakat adalah musik. TNI melalui BKS-Kostrad membuat “Panggung Prajurit” dimana para musisi dan kelompok musik (terutama yang sering membawakan lagu-lagu Barat) bisa mengungkapkan kebebasan berekspresi yang di masa pemerintahan Soekarno selalu dipendam.

Jika dikaitkan dengan interpretasi diatas, penelitian ini memfokuskan penelitian sejarah ini di masa Demokrasi Terpimpin. Terkait dengan hal tersebut, secara politik masa Demokrasi Terpimpin dan kebudayaan Barat memiliki hubungan yang tidak bersahabat. Soekarno sendiri sangat membenci dengan kebudayaan-kebudayaan Barat, tetapi dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat bisa dibilang harmonis. Selain itu, untuk memahami penelitian ini, maka politik masa Demokrasi Terpimpin menjadi penting untuk dikaji dan juga musisi maupun kelompok musik yang eksis di masa Demokrasi Terpimpin.

4. Historiografi

Dalam tahapan terakhir ini, penulis memaparkan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi. Historiografi berarti penulisan sejarah, gambaran sejarah tentang peristiwa yang telah terjadi.⁵¹ Pada tahapan ini jenis penulisannya adalah deskriptif analitis yaitu jenis penulisannya yang menggunakan fakta-fakta guna menjawab pertanyaan apa, bagaimana, kapan, dimana, siapa dan mengapa (5W+1H).⁵²

Fungsi historiografi adalah menyampaikan informasi kepada orang banyak dalam memberikan jawaban terhadap perumusan yang diajukan.⁵³ Maka penulis menuliskannya menjadi sebuah peristiwa sejarah. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

- a. **BAB I**, pada tahap ini terdapat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan langkah-langkah penelitian;
- b. **BAB II**, menjelaskan hubungan musik dan politik, situasi dan kondisi politik masa Demokrasi Terpimpin, nasionalisme, dan ancaman kebudayaan Barat di Indonesia;
- c. **BAB III**, menjelaskan terkait Manifesto Politik, kebijakan Soekarno terhadap musik Barat, respon seniman terkait pelarangan musik Barat, dan akhir dari kebijakan Soekarno terhadap musik Barat;
- d. **BAB IV**, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari pokok-pokok pembahasan dan saran.

⁵¹ Ismaun, *Sejarah Sebagai Ilmu*, (Bandung: Historia Utama Press, 2005), hal. 23.

⁵² Sulasman, *Loc cit*, hal. 147.

⁵³ Sulasman, *Loc cit*, hal. 148.